

**KOMPARASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

NOVITA PURBA TAMBAK

NIM: 19060021

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

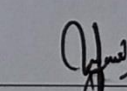
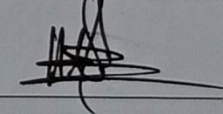
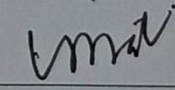
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

KOMPARASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Novita Purba Tambak
NIM/TM : 19060021/2019
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Mike Triani, S.E., M.M.	1. 
2	Anggota	: Dr. Muhammad Irfan, S.E., M.Si.	2. 
3	Anggota	: Urmatul Uska Akbar, S.E., M.E.	3. 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

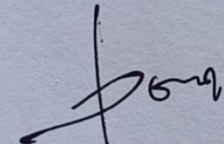
KOMPARASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI SUMATERA
UTARA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Novita Purba Tambak
NIM/TM : 19060021/2019
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

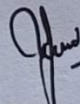
Padang, November 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh
Pembimbing,



Dr. Novva Zulva Riani, S.E, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001



Mike Triani, S.E., M.M
NIP. 19840129 200912 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Purba Tambak
NIM/Tahun Masuk : 19060021/2019
Tempat, Tanggal Lahir : Purba Tua Rambah, 16 November 2000
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Purba Tua Rambah
No.HP/Telepon : 082362880979
Judul Skripsi : Komparasi Ketimpangan Pembangunan Antara Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Kepala Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2025

Yang Menyatakan,



Novita Purba Tambak
Novita Purba Tambak
NIM: 19060021

ABSTRAK

Novita Purba Tambak (19060021) : Komparasi Ketimpangan Pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Dibawah bimbingan ibu Mike Triani, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan variabel penelitian Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi dari kedua wilayah.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan uji beda (t-Test) dengan menggunakan data BPS tahun 2019-2023. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dari Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pembangunan.

Kata kunci: : Ketimpangan Pembangunan, Indeks Williamson, Belanja Daerah, TPAK, IPM, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Uji t-Test

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Komparasi Ketimpangan Pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, S.E., M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
3. Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan ibu Mike Triani, S.E., M.M selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Irfan, S.E., M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Urmatul Uska Akbar, S.E., M.E selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ibu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kak Asma Lidya, S.M selaku admin Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
8. Kepada seorang yang kini telah beristirahat di rumah Bapa di surga Alm. Rosliani Br Saragih, yang penulis panggil “Mama” sosok yang sangat penulis rindukan selama dua puluh tahun lamanya. Kini anakmu Ovi, telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tidak sempat mama saksikan, namun setiap pencapaian ini tidak lepas dari doa dan kasihmu yang tertanam sejak awal kehidupan penulis. Meski kehadiranmu sangat singkat di dunia ini, penulis yakin cintamu tetap hidup mengiringi setiap langkah dan doa penulis setiap hari.
9. Cinta pertama dan panutan penulis, bapak tersayang Arifinsius Purba, terimakasih atas cinta, doa dan perjuangan yang selalu di usahakan untuk penulis. Kepada teman hidup bapak, mama Berliana Sitangang, terimakasih telah berjuang bersama bapak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk penulis. Kiranya Bapak dan Mamak panjang umur dan sehat serta kebahagiaan senantiasa mengiringi sepanjang kehidupan.
10. Kakak Suryati Purba, yang sangat penulis hormati dan kasihi, yang menjadi alasan penulis dapat melangkah jauh sampai hari ini. Terimakasih atas kerja keras, cinta dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis..

Gelar ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik kakak sebagai bukti cinta dan pengorbanan yang tulus.

11. Kedua adek tersayang, Ramondo Purba dan Topan Purba, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis. Serta kepada keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan langkah penulis, Pa Baggal, Inang, kakak dan kela.
12. Kepada sahabat penulis, Tiany Sembiring, Anna Zebua, Nadirah Husnaidi terimakasih atas cinta dan persahabatan yang terjalin selama ini. Kepada Kak Astri Lubis dan Asri Hutabarat, yang menjadi teman serumah serta sahabat bagi penulis. Kepada sahabat komsel terkasih Kak Krispada dan Karolina, kak Melyn Sijabat, kak Desi Sirait, kak Raulina, Dearika dan kak Nunung Emalya.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca terhadap skripsi ini agar dapat menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat.

Padang, Agustus 2025

Novita Purba Tambak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	19
A. Landasan Teori.....	19
1. Pembangunan Ekonom	19
2. Belanja Daerah.....	24
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	26
4. Infrastruktur	28
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	30
6. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual	37
D. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41

D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Defenisi Operasional Variabel	42
1. Variabel Dependen	42
2. Variabel Independen.....	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	49
2. Analisis Deskriptif	50
3. Analisis Induktif.....	69
4. Pembahasan	81
BAB V	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1 Uji Normalitas Belanja Daerah Sumatera Utara 2019-2023	71
Gambar 4.2 Uji Normalitas Belanja Daerah Sumatera Barat 2019-2023.....	71
Gambar 4.3 Uji Normalitas TPAK Sumatera Utara 2019-2023.....	72
Gambar 4.4 Uji Normalitas TPAK Sumatera Barat 2019-2023.....	73
Gambar 4.5 Uji Normalitas Infrastruktur Sumatera Utara 2019-2023.....	73
Gambar 4.6 Uji Normalitas Infrastruktur Sumatera Barat 2019-2023	74
Gambar 4.7 Uji Normalitas IPM Sumatera Utara 2019-2023.....	74
Gambar 4.8 Uji Normalitas IPM Sumatera Barat 2019-2023	75
Gambar 4.9 Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 2019-2023 .	76
Gambar 4.10 Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 2019-2023	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023.....	5
Tabel 1.2 Belanja Daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023.....	7
Tabel 1.3 TPAK Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023.....	8
Tabel 1.4 Infrastruktur Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023	10
Tabel 1.5 IPM Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023	12
Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023.....	14
Tabel 4.1 Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2019-2023	52
Tabel 4.2 Belanja Daerah Sumatera Utara 2019-2023	55
Tabel 4.3 Belanja Daerah Sumatera Barat 2019-2023	56
Tabel 4.4 TPAK Sumatera Utara 2019-2023	58
Tabel 4.5 TPAK Sumatera Barat 2019-2023.....	59
Tabel 4.6 Infrastruktur Sumatera Utara 2019-2023.....	61
Tabel 4.7 Infrastruktur Sumatera Barat 2019-2023.....	62
Tabel 4.8 IPM Sumatera Utara 2019-2023.....	64
Tabel 4.9 IPM Sumatera Barat 2019-2023.....	67
Tabel 4.10 Laju Pertumbuhan Sumatera Utara 2019-2023	69
Tabel 4.11 Laju Pertumbuhan Sumatera Barat 2019-2023	68
Tabel 4.12 Hasil Uji t-Test variabel Belanja Daerah.....	76
Tabel 4.13 Hasil Uji t-Test variabel TPAK.....	77
Tabel 4.14 Hasil Uji t-Test variabel Infrastruktur	78
Tabel 4.15 Hasil Uji t-Test variabel IPM	79
Tabel 4.16 Hasil Uji t-Test variabel Laju Pertumbuhan.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Uji t-Test variabel Belanja Daerah	97
Lampiran 2. Uji t-Test variabel TPAK.....	98
Lampiran 3. Uji t-Test variabel Infrastruktur	99
Lampiran 4. Uji t-Test variabel IPM	100
Lampiran 5. Uji t-Test variabel Laju Pertumbuhan.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu negara, karena dalam dunia globalisasi saat ini yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor bisnis saja, namun juga pada bidang lain seperti bidang sosial, budaya, dan politik. Pembangunan adalah proses peningkatan pendapatan total dan per kapita dengan tetap memperhatikan pertumbuhan penduduk, yang disertai dengan perubahan mendasar dalam struktur perekonomian suatu negara yang memperbaiki atau memantapkannya (Hasyim, 2016). Proses pembangunan suatu negara setidaknya terdiri dari tiga komponen fundamental atau nilai-nilai inti yang menjadi landasan konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna akhir dari pembangunan. Ketiga nilai tersebut antara lain kecukupan, harga diri, dan kebebasan. Ketiga komponen ini terkait erat dengan kebutuhan mendasar kehidupan manusia.

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut para ekonom (Hasyim, 2016), pertumbuhan ekonomi mengacu pada proses peningkatan kapasitas produktif suatu negara, yang berujung pada peningkatan pendapatannya. Laju pertumbuhan ekonomi

menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau utama: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Meskipun Indonesia mempunyai kebijakan pembangunan nasional yang sama, namun daerah-daerah tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dalam proses pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia dan mempunyai sepuluh provinsi dengan ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya permodalan, dan lain sebagainya.

Permasalahan ketimpangan pembangunan merupakan persoalan sejarah yang dihadapi setiap negara, mulai dari tingkat sub-regional, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan, bahkan global (Sahban & Se, 2018). Masalah ketimpangan ekonomi dapat terjadi di negara mana pun, baik negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang berbeda-beda, sehingga daerah yang kaya sumber daya relatif lebih maju dibandingkan daerah yang miskin sumber daya. Menurut Williamson pembangunan pada awal periode hanya terkonsentrasi pada satu titik di suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi menyebar seiring dengan berkembangnya perekonomian negara tersebut ke wilayah-wilayah yang menjadi pemasok sumber daya, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan menjadi lebih kecil. Hal ini sesuai dengan pandangan

Kuznet (Todaro, M. P., & Smith, 2011) yang menyatakan bahwa ketimpangan pada awal pembangunan tinggi namun cenderung membaik seiring berjalannya waktu. Hubungan ini dapat direpresentasikan dengan kurva berbentuk U terbalik.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia muncul karena sistem pemerintahan Indonesia yang semula terpusat, namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan Indonesia telah berkembang menjadi sistem desentralisasi. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Tujuan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan dapat berkurang karena pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran di daerahnya. Namun pembangunan daerah tidak lepas dari peran pemerintah pusat.

Ketidaksetaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara telah menjadi topik isu yang fundamental yang memerlukan penanganan yang luas. Ketimpangan Pembangunan ini terlihat dari kesenjangan yang mencolok dalam beberapa aspek yakni pendapatan, tingkat kesejahteraan, akses kabupaten/kota (Zasriati, 2022). Fenomena dari ketidaksetaraan ini merupakan hasil dari perbedaan karakteristik wilayah, Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan tingkat investasi yang tidak merata antar daerah. faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara meliputi: (1) keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di daerah, (2) konsentrasi aktivitas

ekonomi yang terpusat di kawasan perkotaan, (3) disparitas kualitas sumber daya manusia, (4) perbedaan alokasi investasi pembangunan, dan (5) ketimpangan distribusi dana perimbangan antar daerah (Zega et al., 2022)

Sumatera Utara dan Sumatera Barat berada dalam suatu wilayah yaitu Pulau Sumatera yang berada dalam sistem Fiskal nasional yang sama. Namun, walaupun dalam sistem fiskal yang sama, kedua wilayah ini memiliki pola ketimpangan pembangunan yang kontras. Sumatera Utara memiliki ketimpangan wilayah yang cukup tinggi dibandingkan Sumatera Barat. Ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Utara diakibatkan oleh dominasinya pembangunan di wilayah perkotaan sementara itu Sumatera Barat memperlihatkan pola pemerataan yang lebih menyebar antar kabupaten dan kotanya, meskipun hingga saat ini ketimpangan wilayah di daerah pesisir dan pedalaman masih menjadi persoalan (Rani et al., 2021)

Dalam struktur ekonomi kedua wilayah ini memiliki perbedaan. Sumatera Utara memiliki keunggulan pada sektor industri dan perdagangan sedangkan Sumatera barat lebih dominan pada sektor pertanian, pendidikan dan pemerintahannya. Perbedaan klasifikasi ekonomi kedua wilayah ini menciptakan peluang analisis komparatif terhadap bagaimana komponen seperti Belanja Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Infrastruktur jalan (dalam kondisi baik), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh terhadap disparitas pembangunan pada wilayah masing-masing.

Dalam pengukuran tingkat ketimpangan atau kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diketahui menggunakan metode penentuan nilai Indeks Williamson. Pengukuran dilakukan dengan cara melihat nilai akhir Indeks Williamson, semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Namun, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 1.1
Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

Tahun	Sumatera Utara		Sumatera Barat	
	IW	Kategori	IW	Kategori
2019	0.5757	Ketimpangan Sedang	0.2666	Ketimpangan Rendah
2020	0.5639	Ketimpangan Sedang	0.3020	Ketimpangan Rendah
2021	0.5565	Ketimpangan Sedang	0.3053	Ketimpangan Rendah
2022	0.5603	Ketimpangan Sedang	0.3076	Ketimpangan Rendah
2023	0.5762	Ketimpangan Sedang	0.3105	Ketimpangan Rendah

Sumber: BPS (Data Diolah)

Tabel 1.1 menampilkan data Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2023. Indeks Williamson Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada Tabel 1.1 nilai indeks tertinggi Sumatera Utara tampak pada tahun 2023 dengan nilai 0.5762 sedangkan nilai indeks terendah Sumatera Utara dengan nilai 0.5565 terjadi pada tahun 2021. Data Indeks Sumatera Barat dengan nilai tertinggi 0.3105 terjadi pada tahun 2023

sedangkan nilai indeks terendah Sumatera Barat terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 0.2666.

Perbandingan antara Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat memperlihatkan bahwa Sumatera Barat memiliki nilai indeks yang lebih rendah daripada Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara relatif tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Nilai indeks yang lebih tinggi di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan tingkat pembangunan, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, pemerintah Sumatera Utara telah mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmatif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi prasyarat dalam tercapainya pemerataan pembangunan di Sumatera Utara. Sasaran pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk menjadi harapan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata (Sianipar, 2015 dalam Harahap et al., 2024). Salah satu instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yakni belanja daerah. Belanja pemerintah yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Tabel 1.2
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

Belanja Daerah		
Tahun	Sumatera Utara (%)	Sumatera Barat (%)
2019	8,3	11,6
2020	7,7	10,5
2021	8,3	10,9
2022	8,1	10,8
2023	8,2	10,3
total	40,5	54,1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel 1.2 data rasio belanja daerah Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 memperlihatkan pola yang stabil dengan peningkatan ringan. Rasio terendah di Sumatera Utara adalah pada tahun 2020, diartikan dengan kontribusi Belanja Daerah 7.7% dari total PDRB. Penurunan pada tahun 2020 dapat diakibatkan oleh pandemic COVID-19, yang menyebabkan penyesuaian alokasi fiskal. Rasio Belanja daerah di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang konsisten. Penurunan terjadi selama lima tahun terakhir, dari 11,6 sampai 10,3 ini menunjukkan penyesuaian belanja akibat pemulihan pasca pandemi.

Pada tabel tersebut terlihat perbedaan rasio belanja daerah antara Sumatera Utara dan Sumatrera Barat. Tingginya belanja daerah tersebut menggambarkan komitmen dari pemerintah untuk membiayai pembangunan dan juga pelayanan publik di daerah masing-masing. Namun demikian, efektifitas alokasi dari belanja daerah tersebut juga perlu di perhatikan agar tepat sasaran dalam keperluan pembangunan. Perbedaan nilai belanja daerah dari kedua wilayah tersebut dapat

diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya perbedaan struktur pendapatan daerah serta banyaknya jumlah kabupaten/kota.

Ketimpangan pembangunan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan problematika ketenagakerjaan. Pemerataan pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari peran sumber daya manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja. input pembangunan bahkan konsumen dari hasil pembangunan tersebut.. (Darzal. 2016) Kenaikan Partisipasi Angkatan kerja atau produktivitas dapat memberikan potensi bertambahnya output. dalam hal ini output diartikan sebagai pendapatan per kapita yang diterima oleh angkatan kerja tersebut. Semakin besar pendapatan atau upah yang didapatkan maka semakin besar kemampuan masyarakat tersebut untuk melakukan konsumsi dan hal inilah yang akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin merata.

Tabel 1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

TPAK (Persen)		
Tahun	Sumatera Utara	Sumatera Barat
2019	70.19	67.88
2020	68.67	69.01
2021	69.10	67.72
2022	69.53	69.30
2023	71.06	69.61
Rata-rata	69.71	68.70

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel 1.3 selama periode 2019 hingga 2023 terlihat bahwa Sumatera Utara mempunyai nilai TPAK yang lebih tinggi daripada Sumatera Barat. Nilai TPAK tertinggi di Sumatera Utara yakni 71.06 % terjadi di tahun 2023 dan Nilai TPAK terendah 68.67% terjadi pada tahun 2020. Sementara, di Sumatera Barat nilai TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 69.61% dan nilai TPAK terendah pada tahun 2021 dengan nilai 67.72%. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Utara lebih aktif dalam kegiatan ekonomi daripada Sumatera Barat.

Perbedaan TPAK antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan gambaran pola ekonomi yang lebih beragam di Sumatera Utara dan menyimpulkan bahwa partisipasi dan proporsi penduduk usia kerja di Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Barat, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingginya TPAK tidak mencerminkan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut, karena tingginya TPAK dapat disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan penduduk untuk bekerja.

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap minimnya infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia. Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2019-2023 yang menyatakan bahwa pembangunan Sumut mempunyai prioritas termasuk peningkatan infrastruktur yang baik dan ramah lingkungan. Perbaikan

infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi. membuat arus barang dan jasa menjadi lebih efisien, mengurangi biaya, dan memberikan kemudahan akses terhadap aktivitas bagi masyarakat (Iqbal *et al.* 2017). Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan produktivitas suatu daerah. Misalnya saja infrastruktur seperti panjang jalan raya di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera yang secara bertahap ditingkatkan.

Tabel 1.4
Infrastruktur Panjang Jalan (kondisi baik) Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Infrastruktur		
Tahun	Sumatera Utara (km/km ²)	Sumatera Barat (km/km ²)
2019	0.016	0.006
2020	0.017	0.021
2021	0.015	0.021
2022	0.017	0.021
2023	0.023	0.025
total	0.087	0.093

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.4 menunjukkan perbandingan rasio panjang jalan dalam kondisi baik di Sumatera Utara dan Sumatera Barat periode 2019-2023. Pada data di atas terlihat data Panjang Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019-2023 di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun rata-rata nilai panjang jalan dalam kondisi baik di Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Utara. Dari data tersebut dapat disimpulkan ketersediaan dan kualitas dari jalan di Sumatera Barat lebih baik

dibandingkan dengan Sumatera Utara. Hal tersebut berpotensi mendorong mobilitas perekonomian dan pemerataan pembangunan yang lebih tinggi di Sumatera Barat.

Mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Hal ini lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kusuma *et al.*, 2019). IPM sendiri memiliki tiga indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang saling berkaitan (Muqorrobin, 2017). Ketiga indikator ini juga harus bersinergi karena menjadi tolak ukur penghitungan IPM. Keberhasilan indikator-indikator tersebut akan berdampak pada pertumbuhan IPM. Pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menentukan pertumbuhan penduduk. Permasalahannya pada IPM, kontribusi ketiga komponen tersebut memberikan nilai IPM yang berbeda-beda pada setiap daerah. Oleh karena itu, IPM dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. hal ini tercermin pada lembaga pendidikan. Pendidikan tinggi akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan menentukan pertumbuhan penduduk. Jika setiap orang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pendapatannya akan meningkat. begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi penduduknya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan pembangunan akan berkurang.

Tabel 1.5
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi
Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

IPM (%)		
Tahun	Sumatera Utara	Sumatera Barat
2019	71.74	72.39
2020	71.77	74.29
2021	72.00	74.56
2022	72.71	75.16
2023	73.37	75.64
Rata-rata	72.32	74.41

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel 1.5 terlihat bahwa Indeks pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara periode 2019-2025 menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2023 menjadi nilai IPM tertinggi di Sumatera Utara yaitu 73.37 sedangkan nilai IPM terendah terjadi pada tahun 2019 yakni 71.74. Data di Sumatera Barat memperlihatkan nilai IPM yang meningkat dan stabil selama periode 2019 hingga 2023 dengan Nilai IPM tertinggi 75.64 pada tahun 2023 dan IPM terendah 72.39 pada tahun 2019.

Data pada tabel IPM memperlihatkan kondisi antara IPM Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Data tersebut juga menunjukkan IPM Sumatera Utara lebih rendah daripada Sumatera Barat yang mencerminkan bahwa dibandingkan dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, diukur dari aspek pendidikan, standar hidup dan kesehatan. Perbandingan

dari nilai IPM Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan nilai IPM Sumatera Barat lebih tinggi dari Sumatera Utara dengan arti bahwa Sumatera Utara memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih rendah daripada Sumatera Barat.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan PDRB per kapita. Pada Umumnya indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah Produk Domestik Bruto pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi di suatu daerah Provinsi. Faktor ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, semakin positif prospek PDRB, semakin baik pembangunan daerah. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto sangat penting bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan, baik barang maupun jasa, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, kesempatan kerja, dan status pembangunan sehingga mengurangi ketimpangan di setiap daerah. Tujuan utama dari laju pertumbuhan PDRB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menghilangkan kesenjangan sosial antar wilayah dan mengurangi jumlah ketimpangan pembangunan di Indonesia (Janah. 2022).

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi
Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

Pertumbuhan Ekonomi (%)		
Tahun	Sumatera Utara	Sumatera Barat
2019	5.22	5.01
2020	-1.07	-1.61
2021	2.61	3.29
2022	4.73	4.36
2023	5.01	4.62
Rata-Rata	3.30	3.13

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Data Pertumbuhan Ekonomi pada tabel 1.6 menunjukkan fluktuasi Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama periode 2019 sampai 2023. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 5.22 sedangkan nilai terendah -1.07 terjadi pada tahun 2020. Pada data Sumatera Barat nilai Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 5.01 sedangkan nilai terendah -1.61 pada tahun 2020.

Perbedaan nilai dari kedua Provinsi memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kedua Provinsi mengalami penyusutan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sumatera Utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2019 dan 2023, namun Sumatera Barat memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan dengan Sumatera Utara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Sumatera barat memiliki kemampuan pemulihan lebih cepat dari pandemi Covid-19.

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat adalah dua wilayah yang memiliki karakteristik wilayah, sosial dan ekonomi yang berbeda. Dibandingkan dengan Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya struktur ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan basis pertanian dan budaya lokal yang kuat. Perbedaan karakteristik kedua wilayah ini mempengaruhi distribusi pembangunan masing-masing wilayah, sehingga Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Barat menarik untuk diteliti secara komparatif.

Penelitian ini secara khusus membahas tentang perbandingan tingkat ketimpangan wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat berdasarkan data Kabupaten/kota dari kedua wilayah tersebut, serta menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan sejumlah indikator pembangunan. Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, serta sejauhmana Perbandingan antara ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Komparasi Ketimpangan Pembangunan Antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
2. Sejauhmana Belanja daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
3. Sejauhmana Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
4. Sejauhmana infrastruktur Panjang Jalan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
5. Sejauhmana IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
6. Sejauhmana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas. maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat

3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur Panjang Jalan terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
5. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
6. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai penambah ilmu dan pemikiran yang berhubungan dengan ketimpangan Pembangunan. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dalam penyusunan strategi dalam mengatasi

ketimpangan pembangunan melalui pemanfaatan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur, IPM, dan PDRB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uji statistik yang menggunakan uji beda (t-Test) dalam penelitian ini serta pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja daerah (X1) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal atau belanja pembangunan antar provinsi tersebut tidak merata, dan dapat berdampak terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.
2. Variabel panjang jalan (X2) juga menunjukkan perbedaan signifikan, yang mengindikasikan ketimpangan dalam distribusi infrastruktur antar kabupaten/kota. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap aksesibilitas antar wilayah yang turut memperbesar ketimpangan pembangunan.
3. Infrastruktur Panjang Jalan dalam kondisi baik (X3) mengindikasikan bahwa masih terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu.
4. Variabel IPM (X4) juga menunjukkan perbedaan signifikan, yang memperkuat temuan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah juga tercermin dalam aspek kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan IPM

turut memperbesar kesenjangan antar wilayah, sebagaimana ditegaskan dalam literatur pembangunan wilayah.

5. Variabel pertumbuhan ekonomi (X5) tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua provinsi. Artinya, meskipun terdapat ketimpangan dari sisi belanja, infrastruktur, dan IPM, tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung seragam. Namun, pertumbuhan yang homogen belum tentu mencerminkan pembangunan yang merata.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi belanja daerah agar lebih berpihak kepada wilayah-wilayah tertinggal. Pemerataan belanja dapat menstimulasi pembangunan yang lebih inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur jalan perlu difokuskan pada daerah-daerah yang masih rendah aksesibilitasnya, guna mempercepat pertumbuhan wilayah pinggiran dan mengurangi disparitas antar kabupaten/kota.
3. Kebijakan peningkatan IPM perlu diarahkan pada daerah-daerah dengan capaian SDM rendah, terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan, guna menciptakan keseimbangan pembangunan manusia antar wilayah.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, atau indeks akses

layanan publik, serta melakukan pendekatan spasial atau regresi panel untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah. H.. & Budyanra. B. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2019. No. 1. pp. 424-429).
- Alfurqani. Z. H.. Widiarsih. D.. & Algusri. J. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum. Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*. 1(1). 295-307.
- Amsari. S.. Harahap. I.. & Nawawi. Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. 8(1). 729-738.
- Astuti. R. D. (2015). Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. *Tirtayasa Ekonomika*. 15(1). 17–30.
- Azim. A. N.. Sutjipto. H.. & Ginanjar. R. A. F. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*. 2(1). 1-16.
- Arini Sita. P. R. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. *085228282256*. 2(2). 180–198. <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284>
- Anwar. A. A.. Rorong. I. P. F.. & Tolosang. K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 23(6). 85–96.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Sairi, N. (2013). *Mapping the Demography of Sumatra*. Springer
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Panjang Jalan Antar Provinsi di Indonesia*. Jakarta: badanpusatstatistik.com.
- Didia. K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*. 5(1). 101-108.
- Darzal. D. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 4(2). 131–142. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i2.3588>
- Ghozali. I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harlina. H.. & Manduapessy. R. L. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*. 3(2). 131-156.
- Hasyim. A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap Evi Syuriani. Khaira Imamul. Simanjuntak Loranty Folia. S. I. (2024). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Utara. *Economy And Currency Study*. 6(2).
- Handayani. D. V. (2025). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi . Investasi . dan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2022*. 25(1). 186–192.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5777>
- Iswanto. A. (2018). Analisis Inflasi. Produk Domestik Regional Bruto. Pengeluaran Pemerintah. Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016). *Jurnal Ilmu Ekonomi UII*.
- Iqbal. M.. Rifin. A.. & Juanda. B. (2017). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. *Economic and Finance Review*. 21(1). 75-84.
- Ilham & Evita. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Bumi Indonesia*. 6(4). 1.
- Janah. M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat PDRB Per kapita. Indeks Pembangunan Manusia. Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen. Bisnis dan Akuntansi*. 1(4). 23-43.
- Jhingan. M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kusuma. D. S. D.. Sarfiah. S. N.. & Septiani. Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Inflasi. dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*. 1(3). 282-293.
- Kusumawati, I. (2018). *Kualitas Angkatan Kerja Indonesia: TPAK dan Produktivitas Sektor Informal*. *Jurnal Sains Sosial dan Ekonomi*, 15(2), 77–89.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN

- Muqorrobin. M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. 5(3).
- Maulana. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*. 19(1). 1–6.
- M. R. Khairul Muluk. Wima Yudo Prasetyo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(4). 110–119. <https://media.neliti.com/media/publications/74424-ID-analisis-ketimpangan-pembangunan-studi-d.pdf>
- Marwan, R., & Nasution, L. (2021). *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pemerataan IPM Kabupaten/Kota di Sumatera*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 22(1), 55–70
- Nurhuda. R., Muluk. M. R. K., & Prasetyo. W. Y. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011) Rama Nurhuda.
- Nugroho, H., & Fauzi, R. A. (2020). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Faktor Penentunya di Kawasan Barat Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(3), 123–137.
- Paddu. A. H. (2024). *Ekonomi Indonesia Kini dan Esok*. Makassar: Unhas Press
- Pamiati. B. A., & Woyanti. N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*. 4(1). 17-28.
- Putri, A. F., & Haris, A. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Indonesia Bagian Barat*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(1), 44–58.
- Rudi. P., & Sutjipto. N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 6(3).
- Ramadhan. P. R., & Umiyati. E. (2021). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bungo. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 10(2). 135–146. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.13058>
- Rani, S., Yulita, N., & Harun, R. (2021). Disparitas Wilayah dan Pembangunan Inklusif di Sumatera Barat. Jurnal Perencanaan Wilayah, 19(2), 101–112.

- Rahardjo, B., & Lestari, W. (2020). *Ketimpangan Infrastruktur Jalan antar Provinsi di Indonesia*. Jurnal Infrastruktur dan Transportasi, 12(2), 101–117.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Safitri, N. (2019). *Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Ekonomi Regional, 7(1), 13–23
- Sahban. M. A.. & Se. M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Makassar: Sah Media.
- Sinaga. J. A.. Purba. E.. & Panjaitan. P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Alokasi Umum (DAU). dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*. 2(1). 40-48.
- Simanjuntak. P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Swasono. Y. (1983). *Metode perencanaan tenaga kerja: tingkat nasional, regional dan perusahaan*. BPFE.
- Sovita. Y. D. R. I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*. 2(4).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukwika. T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 6(2). 115-130.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Todaro. M. P.. & Smith. S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11 ed.). Erlangga
- Wanti. O.. Zulgani. Z.. & Rosmeli. R. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*. 6(3).
- Widiansyah. A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*. 17(2). 207-215.
- Wididarma. K.. & Jember. M. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 10(7). 2982-3010.

- World Bank. (2016). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- Wibowo, A., & Hidayat, T. (2020). *Korelasi Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Regional*, 8(2), 103–115.
- Yuliani, T., & Sari, R. N. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah terhadap Infrastruktur Jalan Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 89–100.
- Zasriati. M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al-Dzahab*. 3(2). 119–131.
<https://doi.org/10.32939/dhb.v3i2.1494>
- Zega. Y. T., Mursalin. D., & Yudhistira. I. P. (2022). Ketimpangan Pembangunan Dan Konvergensi Pendapatan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*. 8(2). 188. <https://doi.org/10.35906/jep.v8i2.1169>